KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Berbalik Arah, DPR Kompak Tolak Kenaikan Tunjangan
Tanggal : Selasa, 22 September 2015
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : A2

Berbalik Arah, DPR Kompak Tolak Kenaikan Tunjangan

[JAKARTA] Fraksi-fraksi di DPR akhirnya sepakat untuk menolak usulan kenaikan tunjangan anggota dewan. Kalangan anggota DPR sepakat untuk mengembalikan selisih uang tunjangan jika dana tersebut tetap dimasukkan ke rekening gaji mereka.

Pernyataan itu diungkapkan sejumlah pimpinan fraksi dan anggota DPR yang dihimpun *SP* di Jakarta, Selasa (22/9). Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, pihaknya menolak rencana kenaikan tunjangan bagi anggota DPR atau pejabat negara lainnya. Diharapkan, anggaran yang hendak digunakan itu dialihkan demi meningkatkan daya beli masyarakat.

Bagi PKS, kondisi perekonomian negara semakin terpuruk dan ekonomi rakyat semakin sulit sebagai imbas dari pelemahan rupiah dan perlambatan ekonomi. "Tidak tepat dan tidak elok jika rencana kebijakan kenaikan tunjangan bagi pejabat negara tersebut dilanjutkan," kata Jazuli.

PKS awalnya memahami dan menghormati rencana kenaikan tunjangan tersebut, karena didasari pada asumi ekonomi Indonesia yang tumbuh baik. Namun, ternyata asumsi itu salah, karena yang sedang terjadi adalah kondisi ekonomi yang semakin sulit.

Anggota Fraksi Partai Golkar M Misbakhun mendukung bila semua anggota dewan menolak rencana kenaikan tunjangan sesuai usulan Setjen DPR dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. Dia mengusulkan agar semua fraksi di DPR mengirimkan surat resmi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar kenaikan gaji serta tunjangan itu dibatalkan dan tak dieksekusi.

Menurut Misbakhun, sikap Fraksi Partai Golkar sudah jelas, seperti disampaikan Ketua Fraksi Ade Komaruddin, yakni menolak kenaikan tunjangan. Alasannya, momentum saat ini kurang tepat, karena situasi ekonomi sedang kurang baik.

Namun, Misbakhun menjelaskan, proses pembatalannya juga harus sesuai mekanisme. Posisi agak sulit karena di Badan Anggaran (Banggar) DPR, keputusan kenaikan itu sudah susah untuk dibatalkan. Sebab, hal kenaikan tunjangan itu sudah dibahas. Baginya, jauh lebih mudah bila Pemerintah didorong untuk membatalkan kenaikan itu.

"Saran saya, semua fraksi di DPR mengirim surat ke Pemerintah untuk membatalkan supaya ini tak menjadi polemik," kata Misbakhun. Dia juga meminta fraksi-fraksi di DPR tidak menjadikan isu kenaikan tunjangan itu sebagai bagian dari pencitraan.

Anggota Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengungkapkan, ketua umum partainya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah memerintahkan kader di DPR untuk menolak kenaikan tunjangan pejabat dan anggota DPR. Ruhut menegaskan, dirinya akan mengembalikan dana kenaikan tunjangan tersebut jika telah terlanjur dicairkan.

Prinsip Keadilan

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto juga menegaskan, pihaknya sudah mendapat perintah tegas dari Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk menolak kenaikan itu. "Ibu Ketua Umum sudah mengingatkan, jangan sekali-kali membicarakan kenaikan gaji DPR. Situasi sedang tak bagus kayak begini, tak enak ke hati," kata Bambang meniru ucapan Megawati.

Dia pun menyerukan kepada seluruh anggota dewan agar mengingat kembali Prinsip keadilan yang beradab pada pasal kedua Pancasila. Bagi PDI-P, sangat tidak adil dan beradab bila dalam situasi masyarakat yang sedang kesulitan, DPR yang merupakan wakil rakyat lantas meminta kenaikan tunjangan. "Jadi, posisi kami sudah jelas karena kami takkan sampai hati menerima kenaikan tunjangan dengan kondisi masyarakat yang kesusahan seperti ini," ujarnya.

Anggota Fraksi PDI-P Maruarar Sirait menam-

bahkan, bila Pemerintah tetap mencairkan kenaikan tunjangan itu, dia berjanji akan mengembalikannya. "DPR tak cukup hanya beretorika dan berusaha mencari simpati publik tanpa aksi yang jelas. Kalau kenaikan itu saya terima bulan depan, pasti saya kembalikan. Kami sudah menolak," ujar Ara, sapaan akrab Maruarar.

Menurutnya, jauh lebih baik bila anggaran negara yang dialokasikan untuk kenaikan tunjangan DPR itu digunakan untuk program kerakyatan. Misalnya, untuk menambah dana subsidi benih buat petani atau menambah beasiswa buat siswa miskin. Dia mendorong agar DPR tak ragu meminta usulan kenaikan tunjangan itu dibatalkan.

Fraksi PKB menyatakan, kenaikan anggaran tunjangan itu sudah terlanjur disetujui pemerintah. Karena itu, Sekretaris Fraksi PKB Jazilul Fawaid yang juga Wakil Ketua Banggar DPR berharap agar kenaikan itu benar-benar bisa memacu peningkatan kinerja anggota dewan sehingga lebih maksimal.

Ditegaskan Jazilu, pihaknya tidak dalam posisi menolak atau menerima kenaikan tunjangan. Sebab, usulan kenaikan dilakukan oleh BURT dan Setjen DPR. Banggar, ujarnya, tak bisa membatalkan karena tak bisa membahas hingga tataran teknis anggaran atau kerap disebut satuan tiga. "Banggar pun tidak mempunyai kewenangan membahas satuan tiga," kata Jazilul.

Wakil Ketua BURT Dimyati Natakusumah menyindir anggota dewan yang belakangan menolak dan bahkan berniat mengembalikan kenaikan tunjangan itu. "BURT memberikan Penghargaan terhadap orang-orang yang mau menyumbang ke negara. Saya akan membuat piagamnya," kata Dimyati.

Dia menegaskan, kenaikan tunjangan sebenarnya sudah dibicarakan ketika membahas APBN Perubahan 2015 dan saat itu disetujui. Pelaksanaan pencairan direncanakan pada bulan depan (Oktober). Belakangan, muncul lagi usulan penyesuaian tunjangan untuk dimasukkan ke RAPBN 2016. "Yang pasti, kenaikan tunjangan itu seperti yang disetujui dalam APBN-P 2015 dan akan dicairkan mulai bulan depan. usulan itu disarikan dari suara-suara anggota dewan di BURT," ujarnya.

Irma Suryani, anggota BURT DPR dari Fraksi Partai Nasdem, mengatakan, kenaikan tunjangan tersebut belum diperlukan. "Sekarang kami menilai, bandingkan tunjangan itu dengan kinerja. Kalau kinerja hanya di angka 70%, tak perlu naik. Kalau bisa, dimaksimalkan 90%, baru layak masuk (kategori menerima tunjangan)," ujar Irma.

Ketua Fraksi Partai Hanura Nurdin Tampubolon menyatakan, fraksinya menolak kenaikan tunjangan DPR. Untuk itu, dia meminta Menteri Keuangan merevisi surat keputusan (SK) kenaikan tunjangan. "Pembahasannya belum melibatkan fraksi. Saya belum pernah diundang untuk membahas kenaikan tunjangan itu," ujar Nurdin.

Hal yang sama dikatakan Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani. Gerindra, ujarnya, menolak kenaikan tunjangan bagi anggota DPR dengan alasan kondisi perekonomian yang sedang sulit. "Saya sebagai anggota *happy-happy* saja, tapi dilakukan sekarang tidak pas. Saya meminta Menteri Keuangan merevisi surat keputusannya," kata Muzani.

[MJS/C-6/H-14]

Daftar Kenaikan Tunjangan Anggota DPR:

1. Tunjangan Kehormatan

- Ketua Badan/Komisi:	
Rp 4.460.000 menjadi	Rp 6.690.000.
Sempat diusulkan	Rp 11.150.000.
- Wakil Ketua Badan/Komisi:	
Rp 4.300.000 menjadi	Rp 6.450.000.
Sempat diusulkan	Rp 10.750.000.
- Anggota:	
Rp 3.720.000 menjadi	Rp 5.580.000.
Sempat diusulkan	Rp 9.300.000.

2. Tunjangan Komunikasi Intensif

- Ketua Badan/Komisi:	
Rp 14.140.000 menjadi	Rp 16.468.000.
Sempat diusulkan	Rp 18.710.000.
-Wakil Ketua Badan/Komisi:	
Rp 14.140.000 menjadi	Rp 16.009.000.
Sempat diusulkan	Rp 18.192.000.
- Anggota:	
Rp 14.140.000 menjadi	Rp 15.554.000.
Sempat diusulkan	Rp 17.675.000.

3. Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran

- Ketua Badan/Komisi:	
Rp 3.500.000 menjadi	Rp 5.250.000.
Sempat diusulkan	Rp 7.000.000.
- Wakil Ketua Badan/Komisi:	
Rp 3.000.000 menjadi	Rp 4.500.000.
Sempat diusulkan	Rp 6.000.000.
- Anggota:	
Rp 2.500.000 menjadi	Rp 3.750.000.
Sempat diusulkan	Rp 5.000.000.

4. Bantuan Langganan Listrik dan Telepon

Rp 5.500.000 menjadi	Rp 7.700.000.
Sempat diusulkan	Rp 11.000.000.



Foto: ISTIMEWA

PERPUSTAKAAN DPR-RI